

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan diterapkannya PP No. 24 tahun 2005 menjadikan Indonesia pertama kali memiliki SAP. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan, sehingga dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. Standar akuntansi menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Evaluasi adalah salah satu aspek penting dalam menilai kesuksesan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Organisasi pemerintah bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena

informasi yang disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansi pemerintahannya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP mejadi patokan dalam merancang sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Salah satunya adalah PP No. 105/2000 yang secara gambling menyebutkan perlunya SAP dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Seiring dengan digencarkannya reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan kemudian membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep SAP pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK No. 308/KMK.012/2002. Secara umum KSAP mempunyai tugas untuk mensyusun SAP. Akan tetapi SAP ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah. Kewenangan menetapkan atau megatur sistem akuntansi tidak berada di KSAP tetapi berada di Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Beberapa upaya untuk membuat suatu standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik di Indonesia telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Nordiawan, 2006). Ide perlunya SAP sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Sejalan dengan perkembangan akuntansi di sektor swasta yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan SAP

kembali menguat. Pada sektor komersil, standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan (IAI, 1994).

Standar akuntansi keuangan ini penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Hal yang sama juga berlaku pada sektor pemerintahan. SAP akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menuju kepada pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan memulai upaya untuk mengembangkan SAP.

Untuk memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui pengalaman masa lalu, dapat dilakukan evaluasi untuk memperoleh teknik atau metode yang efektif, melakukan investegasi kegagalan dan belajar dari pengalaman masa lalu. Penelitian ini akan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana keberhasilan Penerapan SIMDA dalam mencapai *good government*.

Dengan adanya sistem tata pemerintahan yang baik atau *good government*, pemerintah perlu mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan

mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Menurut Rochaety, *dkk.* (2012:10) “sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara Sumber Daya Manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan.

Menurut Darea (2015), SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi Pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (Mitami, 2013).

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh

terjadinya peningkatan total volume Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan visi BPKP sebagai auditor Presiden yang responsive, interaktif, dan tepercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam menstranformasikan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP No. 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam

mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good government*.

*Good Government Governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan kondisi yang harus ada untuk dipenuhi.

Dalam rangka mewujudkan *good government governance* perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN, yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik.

*Good Government Governance* adalah perubahan yang diharapkan akan melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi keterpurukan. Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang

adil, transparan dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini dipakai sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi *good governance* ke tataran yang lebih rill (Mardiasmo, 2002).

Sejauh ini dampak dari perubahan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu pegawai yang instansi/kantornya sudah menerapkan Aplikasi SIMDA Keuangan harus menyesuaikan diri kembali terhadap perubahan aplikasi tersebut. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, terdiri dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi ini biasa digunakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta pegawai yang berhubungan dengan pelaporan keuangan.

Aplikasi SIMDA Keuangan baru diterapkan pada tahun 2017 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak permasalahan yang dihadapi para pegawai aparatur pemerintah di Balai Laboratorium Kesehatan ketika menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Permasalahan tersebut dapat menghambat proses penerapan SIMDA Keuangan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan SIMDA Keuangan.

Permasalahan yang sering dihadapi berkaitan dengan penerapan SIMDA di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan adalah jaringan yang lemah ketika menginput dalam aplikasi SIMDA. Jaringan yang lemah tentunya sangat menghambat proses penginputan SIMDA. Karena dalam SIMDA harus didukung oleh sistem dan jaringan

yang baik. Dengan adanya sistem dan jaringan yang baik maka akan mengurangi hambatan dalam proses SIMDA.

Hambatan jaringan yang sering lemah menyebabkan pegawai yang menerapkan SIMDA Keuangan sering kali kesulitan untuk menerapkan SIMDA Keuangan. Ketika menerapkan SIMDA Keuangan pegawai sering mengalami kendala saat menerapkan SIMDA Keuangan. Kendala atau permasalahan yang sering dihadapi pegawai ketika menerapkan SIMDA Keuangan yaitu jaringan yang lemah. Akibat dari hambatan jaringan yang lemah menyebabkan selisih dalam pengetikan nominal ketika menerapkan SIMDA Keuangan. Selisih dalam pengetikan nominal ketika menerapkan SIMDA Keuangan dapat mempengaruhi kualitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain jaringan yang lemah, sumber daya manusia juga menjadi permasalahan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan terdapat pegawai yang masih kurang memahami cara menerapkan SIMDA Keuangan. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka dari permasalahan tersebut penerapan SIMDA Keuangan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan evaluasi dari tahun 2017-2018 terkait penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas sumber daya manusia dalam mencapai *good government*.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban demi mencapai tujuan organisasi pada tingkat SKPD khususnya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan yang sudah menerapkan



Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam mencapai *good government*. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Dalam Mencapai *Good Government* Di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SIMDA Keuangan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai *good government*?
2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan SIMDA Keuangan dalam mencapai *good government*?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan hanya untuk mengetahui Bagaimana Penerapan SIMDA Keuangan serta Kualitas Sumber Daya Manusia di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai *good government*.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan bagaimana penerapan SIMDA Keuangan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai *good government*?
2. Untuk membuktikan kualitas sumber daya manusia di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan SIMDA Keuangan dalam mencapai *good government*?

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Teoritis

Dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

2. Kontribusi Praktis

Dalam Penelitian di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengetahui sistem informasi manajemen daerah apakah telah tercapai pemerintahan yang baik (*good government*).

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dari penelitian ini akan digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan kerangka berfikir penelitian.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, tempat penelitian, sumber data, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, metode analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan mengelola data dengan metode analisis data yang sudah ditentukan kemudian menjelaskan hasil tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran serta keterbatasan penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis.